



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 002/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA
BUPATI TABALONG UNTUK MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN
SURAT-SURAT TANDA BUKTI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 khususnya menyangkut keperluan penandatanganan dan/atau pengesahan surat-surat tanda bukti keuangan daerah, perlu menunjuk/ menetapkan Para Pejabat yang diberi wewenang atas nama Bupati Tabalong untuk menandatangani dan/atau mengesahkan surat-surat tanda bukti pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa terhadap Para Pejabat yang ditunjuk/ditetapkan, dianggap memenuhi syarat untuk diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat-surat tanda bukti pengelolaan keuangan berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

- Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Para Pejabat Yang Diberi Wewenang Atas Nama Bupati Tabalong Untuk Menandatangani Dan/Atau Mengesahkan Surat-Surat Tanda Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Berkenaan Dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf dari masing-masing Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dicontohkan dalam kolom 4 (empat) dan 5 (lima) yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2022

h BUPATI TABALONG, *z*









h ANANG SYAKHFIANI *h*

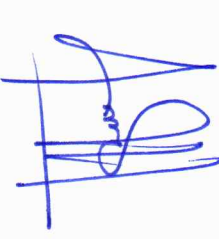
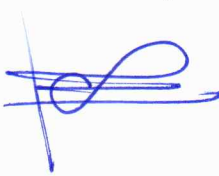


Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalongs di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-



DAFTAR PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA BUPATI TABALONG UNTUK MENANDATANGANI DAN/ATAU
MENGESAHKAN SURAT-SURAT TANDA BUKTI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Jenis Wewenang yang dilaksanakan dalam fungsinya selaku BUD	Tanda Tangan	Paraf
1.	Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI, M.Si NIP. 19630129 198503 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	1.1. Menandatangani surat menyurat berkenaan dengan pengurusan Keuangan Daerah. 1.2. Memaraf salinan Keputusan Bupati Tabalong yang berhubungan dengan pengaturan keuangan Daerah. 1.3. Menandatangani persetujuan pengesahan DPA/DPPA SKPD.		1. 
2.	Drs. M. ZAINAL ARIFFIN, M.Ec.Dev NIP. 19730202 199301 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	2.1. Menandatangani pengesahan DPA/DPPA SKPD. 2.2. Menandatangani lembaran asli dan duplikat Buku Kas Umum Pemegang Kas Daerah. 2.3. Menandatangani lembaran asli SK Penyediaan Dana (SPD). 2.4. Menandatangani Jurnal Penyesuaian/Adjustment. 2.5. Menandatangani lembar asli dan duplikat Register SP2D. 2.6. Menandatangani tanda bukti Penerimaan Keuangan Daerah.		2. 
3.	Hj. MAHRIATUN NISA, SE NIP. 19790715 200312 2 011 Penata Tk.I (III/d) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	3.1. Menerima dan memproses SPM UP-GU-TU dan LS beserta lampirannya dari SKPD. 3.2. Memaraf salinan Keputusan Penyediaan Dana (SPD). 3.3. Menandatangani SP2D Khusus Gaji. 3.4. Menandatangani lembaran asli SP2D dan duplikat SP2D. 3.5. Menandatangani lembaran asli dan duplikat Buku Kas Umum Pemegang Kas Daerah apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 berhalangan. 3.6. Menandatangani tanda bukti Penerimaan Keuangan Daerah apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 berhalangan.		3. 

1	2	3	4	5
4.	M. RIZAL HALIMI, SE. NIP. 19780713 200501 1 009 Penata Tk.I (III/d) Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	4.1. Membubuhi tanda paraf pada Laporan Realisasi dan Laporan Keuangan APBD Kabupaten Tabalong. 4.2. Memaraf Jurnal Penyesuaian.	4. 	4. 
5.	MUHAMMAD RIFQI, SE NIP. 19721216 200604 1 007 Penata Tk.I (III/d) Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	5.1. Menandatangani SP2D Khusus Gaji apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 berhalangan. 5.2. Memaraf lembaran asli dan duplikat SP2D. 5.3. Menandatangani lembaran asli SP2D dan Buku Kas Umum apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 berhalangan.	5. 	5. 

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

